

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INDONESIA YANG BERKARAKTER DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER

Kembali

Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: kambaliibnu@gmail.com

Received	Revised	Accepted
10 Januari 2022	10 Februari 2022	10 Maret 2022

REALIZATION OF THE CHARACTERIZED INDONESIAN EDUCATION IN IMPLEMENTING CHARACTER EDUCATION

Abstract

This study aims to explore the essence of realizing Indonesian education with character in the implementation of character education and the various problems that occur. This research uses a qualitative approach with the type of literature study. The results of the study show that education in the current reform era has really been appreciated, both in terms of policies, laws and regulations, such as government regulations, government rule,, curriculum structuring and technique guidance forms of education management and implementation. Overall it's quite good. However, in the order of implementation, although it is complete and contained in regulations and policies, it turns out that there are weaknesses that must be resolved. These weaknesses include student delinquency which has not been resolved until now, such as brawls between students, brawls between students, students being anarchic, many students consuming illegal drugs and alcohol, there are still many promiscuity.

Keywords: character education, moral degradation, and education wisdom.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hakikat mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkarakter dalam implementasi pendidikan karakter serta berbagai problematikanya yang terjadi. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan di era reformasi saat ini telah betul terapresiasi, baik secara kebijakan, aturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah (PP), Permen, penataan kurikulum dan bentuk JUKNIS dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Secara keseluruhan sudah cukup baik. Namun demikian, pada tatanan implementasi, walaupun telah lengkap dan termaktub dalam peraturan dan kebijakan, ternyata ada sisi kelemahan yang harus dicarikan solusinya. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain kenakalan peserta didik yang sampai sekarang belum teratasi, seperti tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, mahasiswa bersikap

anarkis, banyaknya pelajar mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan miras, masih banyaknya pergaulan bebas.

Kata kunci: pendidikan karakter, kemerosotan moral, dan kebijakan pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah pemberdayaan potensi manusia, melalui gerakan transformasi nilai-nilai, sehingga muncul sikap kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi. Pendidikan juga merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh umat manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan untuk menggapai cita-cita yang diidamkan, memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan, dan mencapai kehidupan aman dan damai, baik secara personal maupun social¹. Dalam menjalankan fungsinya pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, juga untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaan. Dengan demikian, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgen dan perlu diperhatikan serta dikembangkan sebaik mungkin.

Dalam pengembangan pendidikan perlu adanya hubungan sinergi dari berbagai pihak, baik masyarakat, lembaga pengelola pendidikan maupun penentu kebijakan pendidikan (pemerintah). Jika sinergisitas tersebut berjalan, maka sangat mungkin tujuan pendidikan akan mudah tercapai, dan sebaliknya, jika masing-masing berjalan sendiri, tidak saling memikirkan dan membantu, maka akan sangat mungkin juga tidak akan bisa tercapainya tujuan pendidikan yang ideal².

Corak pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari corak politik yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini bisa dilihat dari mulai sejarah awal penyelenggaraan pendidikan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dengan adanya corak tersebut, maka pengelolaan pendidikan di Indonesia harus sesuai dan sejalan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah³.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, disatu sisi membawa perubahan yang cukup positif dan baik. Disisi lain, ada hal-hal yang masih dirasakan kurang atau lemah, seperti penanaman nilai-nilai etika dan pembentukan karakter peserta didik. Kelemahan itu bisa dilihat dari kenakalan remaja, seperti pergaulan bebas, siswa mengkonsumsi narkoba, tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, mahasiswa berprilaku anarkis dan sebagainya.

Untuk mengantisipasi akan hal tersebut di atas, perlu adanya pendidikan agama yang mendalam, dari mulai pengetahuan kognitif, afektif dan psikomotorik, dengan melalui methodology dan strategi tertentu, sehingga peserta didik memahami pesan-pesan agama, juga tertanamnya nilai-nilai etika dan terbentuknya karakter suci (fitriah).

¹ Kembali Kembali, Ilma Ayunina, and Akhmad Mujani, "TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KARATER SISWA DI ERA DIGITAL (Studi Analisis Pemikiran Pendidikan Islam Abuddin Nata)," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2, Sept (2019): 1–19.

² Kembali Kembali, "PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EMOSIONAL SERTA INTELEKTUAL DI MASA PRENATAL," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2, Sept (2018): 129–48.

³ Ali Miftakhu Rosad, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173–90.

Sebagaimana telah di jelaskan bahwa pendidikan merupakan kebijakan politik pemerintah yang mengatur corak, arah dan tujuan pendidikan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah membuat perundang-undangan tentang system pendidikan nasional. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Landasan yang dijadikan payung hukum penyelenggaraan pendidikan saat sekarang adalah UU No. 20 tahun 2003⁴.

Dalam UU No. 20 tahun 2003, telah termaktub dalam pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional, disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berrkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab⁵.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif model *library reseach* yang mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku) yang ditunjukkan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu melakukan analisis kritis dan komparatif tentang meewujudkan pendidikan Indonesia yang berkarakter dan pelaksanaan pendidikan karakter dari berbagai sumber referensi buku dan hasil-hasil penelitian terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia

Proses pengelolaan pendidikan selain dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan oleh pemerintah, dan atau memperoleh subsidi dari pemerintah. Proses demikian, pada akhirnya antara pendidikan dan pemerintah saling mempengaruhi. Pada satu sisi pemerintah dipengaruhi oleh corak dari lulusan pendidikan yang ada, di sisi lain pemerintah mempengaruhi corak pendidikan yang ada. Pada gilirannya corak, arah dan tujuan pendidikan ditentukan oleh corak politik dari pemerintah. Inilah yang kemudian di kenal dengan istilah politik pendidikan⁷.

Dengan demikian, politik pendidikan adalah segala kebijakan yang ditentukan oleh penguasa / pemerintah untuk mengarahkan pemikiran dan menentukan tindakan melalui perangkat pendidikan dalam berbagai keanekaragaman beserta program dan tujuan demi tercapainya cita-cita dan tujuan

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2003.

⁵ Gunawan, H. Ary, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 31

⁷ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

negara. Dari penjelasan tersebut, maka politik pendidikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya kebijakan pemerintah suatu Negara
- Adanya unsur peraturan perundangan tertulis dan tak tertulis.
- Mensukseskan penyelenggaraan pendidikan dan sistemnya
- Untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara.

Kebijakan politik pendidikan di Indonesia, bila dikaji mulai awal sejarah pendidikan dapat di klasifikasikan menjadi empat periodisasi, yaitu;

Pertama : Kebijakan politik pendidikan *pra-kemerdekaan*, fakta sejarah mencatat bahwa penjajah Belanda sangat diskriminatif dan membiarkan rakyat jajahannya tetap menjadi bodoh. Hal ini berbeda dengan negara kolonial lainnya, seperti Inggris dan Prancis, yang memberika perhatian terhadap pendidikan. Kolonial Belanda sama sekali tidak memperhatikan pendidikan di Indonesia, bahkan menekan dan mendiskriminasikan pendidikan. Adanya pendidikan di masa Belanda disebabkan tekanan dunia internasional, dan itupun terbatas pada kalangan dan golongan tertentu dengan tujuan untuk kepentingan kolonialnya. Sementara pendidikan yang dikelola oleh kolonial dikhususkan bagi kalangan-kalangan tertentu, seperti kalangan pejabat, kalangan ningrat, pegawai-pegawai pemerintah, bangsawan dan sebagainya. Masyarakat dan kalangan rakyat jelata tidak bisa masuk di sekolah tersebut. Kolonial Belanda juga selalu memusuhi pendidikan berbasis Islam, seperti pesantren dan madrasah. Dengan permusuhan ini kemudian corak politik pendidikan masa ini *non-kooperatif* dengan kolonial.⁸

Kedua : Kebijakan politik pendidikan *Orde lama*; Pada masa ini sehubungan dengan baru saja merdeka, dan dalam kondisi transisi, maka pendidikan masih dalam mencari bentuk. Di samping itu kekuatan ideologis saat itu mempengaruhi politik pendidikan. Tarik menarik ideologi saat itu (nasionalis, islamis dan skularis-komunis) menjadikan pendidikan (khususnya pendidikan Islam) mengarah pada upaya membendung paham komunis⁹.

Ketiga : Kebijakan Politik pendidikan *Orde baru*; Dimulainya masa orde baru tahun 1966 memberikan dorongan dan harapan pencerahan bagi dunia pendidikan. Secara factual, disatu sisi pemerintah orde baru memberikan perhatian pada dunia pendidikan, di sisi lain dominasi politik kekuasaan yang adikuatif, represif, dominan dan militeris, mengakibatkan kondisi rakyat menjadi lemah, fregmentatif, tidak berperan dan ketakutan. Hal ini menjadikan tidak berhasilnya sebuah tujuan pendidikan, dan bahkan tujuan sebuah negara. Namun demikian, politik pendidikan dimasa orde baru merupakan sebuah tonggak sejarah bagi pendidikan di Indonesia untuk menuju pendidikan modern di saat sekarang. Banyak kebijakan dan perundangan tentang pendidikan muncul di era ini, seperti TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan yang mengacu pada GBHN sejak tahun 1973 -1998, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Teknologi

⁸ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2007.

⁹ Ali Miftakhu Rosyad, "Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI," *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 64–86, doi:10.5281/zenodo.3553865.

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi¹⁰.

Salah satu kebijakan pendidikan pada masa orde baru adalah di bidang pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, efektifitas dan efisiensi pendidikan, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Dari kebijakan tersebut, kemudian pemerintah membuat langkah-langkah strategis seperti penetapan program pemberantasan buta huruf, optimalisasi pendidikan agar masyarakat memiliki kemampuan mental, spiritual dan keterampilan, mengadakan inovasi pendidikan, seperti dibukanya sekolah dan universitas terbuka dan lain sebagainya¹¹.

Dalam hal politik pendidikan, kebijakan pemerintah orde baru menggunakan system sentralistik. Dengan system ini memudahkan pemerintah untuk memonitor dan mengontrol jalanya penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena demikian, maka segala perencanaan pendidikan harus ditentukan dari pusat¹².

Ketiga : Kebijakan politik pendidikan *Orde reformasi*; Kebijakan orde reformasi di tandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1998. Dalam bidang pendidikan, di era reformasi ini melahirkan berbagai kebijakan pendidikan, diantaranya adalah UU No. 20 tahun 2003; tentang system pendidikan nasional, pergantian kurikulum CBSA ke KBK dan kemudian KTSP. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, bila diteliti lebih jauh, ternyata kebijakan politik pendidikan pemerintah reformasi akan sangat banyak sekali dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Bila ditarik kesimpulan, tentang kebijakan politik pendidikan di Indonesia, ternyata pemerintah benar-benar memperhatikan pentingnya sebuah pendidikan untuk membangun tujuan Negara. Hal ini bisa dilihat sejak era kemerdekaan hingga era reformasi dengan dikeluarkannya undang-undang pendidikan, seperti UU No.4 tahun 1950 jo UU No.12 tahun 1954, UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003.

Strategi, Implementasi dan Karakteristik Pendidikan

Pendidikan di era reformasi saat ini telah betul terapresiasi, baik secara kebijakan, aturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah (PP), Permen, penataan kurikulum dan bentuk JUKNIS dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Secara keseluruhan sudah cukup baik. Namun demikian, pada tatanan implementasi, walaupun telah lengkap dan termaktub dalam peraturan dan kebijakan, ternyata ada sisi kelemahan yang harus dicarikan solusinya. Kelemahan-

¹⁰ M Pd I Kambali, "RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH AL-ZARNUJI DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN MODEREN," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 17–30.

¹¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

¹² Muchlas Samani and Hariyanto, *Pendidikan Karakter; Konsep Dan Model*, 2016.

kelemahan tersebut antara lain kenakalan peserta didik yang sampai sekarang belum teratasi, seperti tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa, mahasiswa bersikap anarkis, banyaknya pelajar mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan miras, masih banyaknya pergaulan bebas dan lain sebagainya.

Kenakalan itu ternyata berpengaruh tidak saja pada prestasi siswa, melainkan juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dan menggelisahkan orang tua murid. Ada beberapa penelitian kecil di kota-kota besar, menyatakan betul adanya orang tua merasa gelisah terhadap kenakalan siswa; beberapa ibu mengatakan, " tatkala anak kami berpamitan pagi hari hendak sekolah, kami tidak yakin di siang hari nanti ia akan pulang dalam keadaan utuh sebagaimana ketika ia pergi, tatkala telepon/ Hp berdering, kami sering gugup menerimanya, khawatir itu telepon dari rumah sakit atau dari kantor polisi yang hendak menjelaskan anak kami terbaring di rumah sakit atau di tahan polisi karena tertangkap mabuk atau tawuran dan lain sebagainya"¹³.

Kenakalan remaja/pelajar itu dipertanyakan, mengapa ? dan ada apa?... Jawabannya seringkali berakhir pada kesimpulan bahwa itu disebabkan oleh kegagalan pendidikan agama. Hal itu bisa dipahami, karena keber-agama-an baik, maka siswa itu tidak akan mabuk, tidak akan mengikuti pergaulan bebas, tidak akan melakukan perbuatan anarkis, tidak akan tawuran dan lain sebagainya.

Jika kita menyalahkan pendidikan agama, atau mengatakan pendidikan agama gagal atau kurang berhasil, maka tudingan akan tertuju pada kinerja guru agama, jadi siswa mabuk , tawuran, pergaulan bebas, bersikap anarkis disebabkan oleh gagalnya guru agama. Tesis ini mudah dimengerti, tetapi tesis itu salah, karena menggunakan penalaran yang linear, kenakalan itu disebabkan oleh banyak penyebab, salah satunya mungkin saja kegagalan pendidikan agama.

Pendidikan agama itu tidak akan berhasil bila hanya diserahkan kepada guru agama. Tujuan pendidikan agama itu sangat banyak dan rumit, sehingga tidak mungkin dicapai hanya oleh guru agama. Pendidikan agama (keimanan dan ketakwaan) itu adalah tugas sekolah, bukan tugas guru agama saja. Untuk melaksanakan pendidikan agama agar berhasil, perlu dilakukan pendidikan agama yang terpadu, keterpaduan yang di maksud adalah¹⁴:

- a. *Keterpaduan Tujuan*; yaitu pencapaian tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan pendidikan (stakeholders), yaitu pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan masyarakat.
- b. *Keterpaduan Materi* : yaitu keterpaduan isi kurikulum yang digunakan atau materi pelajaran. Diharapkan semua materi ajar mengarah pada terbentuknya manusia beriman dan bertakwa.
- c. *Keterpaduan Proses* : yakni hendaklah para pendidik menyadari bahwa semua kegiatan pendidikan sekurang-kurangnya tidak berlawanan dengan tujuan pendidikan keimanan dan ketakwaan, bahkan dikehendaki

¹³ Masnur Muslich and Pendidikan Karakter, "Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, Cet. 2," Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

¹⁴ Ajat Sudrajat, "Mengapa Pendidikan Karakter?," *Jurnal Pendidikan Karakter* 1, no. 1 (2011): 47–58, <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1316/1094>.

semua kegiatan pendidikan membantu tercapainya siswa yang beriman dan bertakwa.

- d. *Keterpaduan Lembaga* : yaitu semua lembaga atau unsur-unsur lain yang menunjang keberhasilan pendidikan, seperti sekolah, keluarga, lingkungan dan lain-lain bekerja sama secara terpadu untuk mencapai keberhasilan semua yang berakarakter, beriman dan bertakwa.

Dalam merealisasikan keterpaduan untuk menanggulangi kelemahan pada pendidikan agama di sekolah, agar siswa didik memiliki nilai-nilai agama, ber-etika dan berakarakter. Ada beberapa strategi yang harus di bangun. Strategi tersebut antara lain¹⁵:

1. **Menjadikan pendidikan keimanan dan ketakwaan sebagai core system pendidikan nasional.**

Sebagaimana telah di jelaskan bahwa pendidikan merupakan kebijakan politik pemerintah yang mengatur corak, arah dan tujuan pendidikan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah membuat perundang-undangan tentang system pendidikan nasional. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonsia. Landasan yang dijadikan payung hukum penyelenggaraan pendidikan saat sekarang adalah UU No. 20 tahun 2003.

Dalam UU No. 20 tahun 2003, telah termaktub dalam pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional, disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berrkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹⁶.

Bila dipahami dari tujuan tersebut ternyata keimanan dan ketakwaan belum menjadi *Core* pendidikan nasional. Keimanan dan ketakwaan hanya sub. dari tujuan pendidikan nasional, bukan sebagai *Core*. Bila keimanan dan ketakwaan sebagaai *Core* pendidikan nasional, maka rumusan tujuan itu sebagai berikut:

*“ Pendidikan nasioanal bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa **Yang** berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.*

Walaupun di dalam UU No. 20 tahun 2003 itu keimanan dan ketakwaan tidak dijadikan sebagai *Core* system pendidikan nasional, hal itu tidak mengurangi akan pentingnya keimanan dan ketakwaan. Sebab dalam undang-undang tersebut keimanan dan ketakwaan hal yang sangat penting dalam

¹⁵ Arifin, H.M., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.

¹⁶ Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

pendidikan nasional, dan itu bias dijadikan sebagai pengganti kedudukan pendidikan keimanan dan ketakwaan sebagai *Core* pendidikan nasional¹⁷.

Pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam undang-undang tersebut, dapat di lihat dari pasal-pasal yang ada, seperti pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional, pasal 4 ayat (1): “Pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa”. Pasal 36 ayat (3.a): Kurikulum disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa. Pasal 37 ayat (1.a): Pendidikan agama wajib ada di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pasal 37 ayat (2.a): Pendidikan agama wajib ada di dalam kurikulum pendidikan tinggi¹⁸.

Dari kutipan tersebut, walaupun pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam pendidikan nasional, tetap belum menjadikan pendidikan keimanan dan ketakwaan sebagai *Core* pendidikan nasional. Dengan tidak menjadi *Core* pendidikan nasional tentang pendidikan keimanan dan ketakwaan, akankah efektif UU No. 20 tahun 2003, menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa. Hal ini akan sangat ditentukan oleh Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, dan aturan-aturan di bawah undang-undang itu akan mampu melakukan reformasi pendidikan nasional. Dan kemudian, mampu dan tidaknya, akan ditentukan oleh berhasil atau gagalnya pendidikan keimanan dan ketakwaan, sebab keimanan dan ketakwaan itu merupakan dasar dan pengendali bagi pendidikan bidang-bidang lainnya¹⁹.

Dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tidak ada alasan lagi untuk menjadikan pendidikan keimanan dan ketakwaan sebagai *Core system*, *Core program* dan *Core pendidikan nasional*.

2. Implementasi dan Optimalisasi Pendidikan Etika dan Karakter pada Peserta Didik.

Etika dan karakter merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Istilah Etika memiliki arti yang semakna dengan Akhlak, Adab, Moral, Prilaku baik, dan sebagainya. Sementara Karakter memiliki arti Tabi’at, watak, Fitrah dan lain sebagainya. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Orang yang berperilaku baik (ber-etika), karena ia memiliki karakter baik. Begitu juga orang yang berkarakter adalah orang yang bertabi’at dan membiasakan prilaku baik²⁰.

Kedua istilah tersebut, merupakan buah (Atsar) dari pendidikan agama Islam. Ketika seseorang memahami agama dengan sebenar-benarnya, maka akan muncul prilaku yang baik dan terbentuknya karakter (Fitrah) yang suci. Begitu juga sebaliknya, bila pelaksanaan agamanya kurang, maka moral/etika pun kurang, dan tidak memiliki karakter baik, maka pendidikan agama Islam

¹⁷ Buchori, Mochtar, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*, Jakarta : IKIP Muhammadiyah, 1994.

¹⁸ Daradjat, Zakhiah, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982.

¹⁹ Fathurrohman, Pupuh, Prof. *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung : Reflika Aditama, 2007.

²⁰ Mastuhu, M. Ed, *Memperdayakan Sytem Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

merupakan pembentuk etika dan karakter. Dengan demikian pendidikan agama perlu di ajarkan dan di dalam oleh setiap orang termasuk peserta didik, agar membentuk dan berbuah etika yang baik dan memiliki karakter yang suci²¹.

Pengajaran agama Islam bagi peserta didik, khususnya di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan SMK, bila mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dirasakan adanya kekurangan jam pelajaran. Masalah inilah yang kemudian dianggap sebagai penyebab utama kekurangan peserta didik memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Dari kekurangan inilah pada akhirnya peserta didik tidak mampu membentengi dirinya dari berbagai pengaruh negative. Sehingga timbul kenakalan remaja, tawuran, anarki, mengkonsumsi obat terlarang, bergaulan bebas dan lain sebagainya.

Selain kekurangan jam pelajaran agama, terdapat pula sebab lain yang membuat peserta didik banyak melakukan tindakan negative, yaitu kurang mampunya pihak sekolah dan guru agama meramu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain yang bernuansa religius.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan tentunya dengan menambah jumlah jam pelajaran agama dan dengan melalui penambahan kegiatan ekstra yang mengarah pada pembentukan keimanan dan ketakwaan. Namun demikian, bila solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka harus dicarikan solusi lain, diantaranya²²:

a. Mengubah orientasi dan fokus pengajaran agama.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama islam merupakan usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami (knowing), melaksanakan (doing) dan mengamalkan (being) ajaran Islam melalui kegiatan pendidikan. Dari situlah maka tujuan pendidikan agama islam di sekolah adalah siswa tidak memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²³.

Dalam mengoptimalkan pengajaran pendidikan agama Islam, tidak berarti menambah jumlah jam pelajaran di sekolah, tetapi melalui optimalisasi upaya pendidikan agama Islam. Upaya tersebut bisa berupa optimalisasi guru agama Islam dan optimalisasi kegiatan.

Optimalisasi guru agama Islam dalam pengajaran diharapkan guru mampu merealisasikan karakter utama dari pendidikan agama Islam itu sendiri, yakni memperbanyak muatan being di samping komponen knowing dan doing, artinya bahwa guru harus mampu merubah orientasi dan focus pengajaran yang semula bersifat subject matter orientied, yaitu

²¹ Mulyasa, E, Dr. M.Pd, *Kurikulum Yang Disempurnakan*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006.

²² Nata, Abudin, Prof. Dr. MA, *Manajemen Pendidikan* , Jakarta : Fajar Inter Pratama, 2003.

²³ *Panduan Lengkap KTSP*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2007.

dari orientasi pemberian pengetahuan agama menjadi orientasi pengalaman dan pembentukan sikap keagamaan.

Pola yang harus dibangun dalam mengubah orientasi pengajaran adalah guru dituntut secara professional dalam pengajaran tidak hanya memberikan pemahaman dan hafalan kepada siswa didik, tetapi harus lebih jauh dari itu, guru harus mampu membumikan nilai-nilai ajaran Islam kepada siswa didik dengan melalui methodology pengajaran, sehingga mereka (siswa) dengan penuh sadar diri selalu berperilaku positif dan menjauhi perilaku negative²⁴.

b. Implementasi pembentukan etika dan karakter dengan method internalisasi/personalisasi.

Keberagaman siswa bila diteliti secara factual, mayoritas diantara mereka masih berkuat pada level knowing dan doing. Mereka (siswa) mengerti dan memahami akan hukum dan cara sholat, tetapi mereka masih banyak tidak melaksanakan sholat lima waktu. Mereka mengerti konsep jujur, tahu cara melakukan jujur, tetapi masih banyak diantara mereka sering tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu hukum minum-minuman keras dan obat terlarang dan tahu akibat yang timbul dari minuman dan obat terlarang, tetapi masih banyak mengkomsumsi. Dengan demikian, maka aspek keberagaman itulah yang sangat penting untuk dibangun dan ditingkatkan²⁵.

Untuk membumikan keberagaman bagi siswa didik diperlukan sebuah metode. Menurut pakar pendidikan Islam seperti Prof. Dr. Ahmad Tafsir dan Prof. Achmad Sanusi, metode yang mampu membumikan nilai-nilai keberagaman adalah dengan metode internalisasi, menurut Prof. Djawad Dahlan, menyebutnya metode Personalisasi.

Sesuatu yang telah diketahui dapat saja sekedar diketahui, tempatnya di otak. Untuk mengetahui apakah siswa didik sudah tahu, guru dapat memberikan soal ujian atau ulangan, jika jawabannya benar, maka, berarti murid sudah tahu (mengerti), yang telah diketahui itu, siswa mampu melaksanakannya, tempatnya di anggota badan, untuk yang menetap di otak dan di badan itu boleh jadi menetap saja terus disitu. Dua-duanya itu masih berada di luar kepribadian (intern), karena itu pengetahuan dan kemampuan melaksanakan harus dimasukkan ke daerah intern. Proses memasukkan inilah yang disebut Internalisasi, sementara proses dan upaya yang berupa usaha menjadikan pengetahuan dan kemampuan melakukan itu menyatu dengan pribadi (person), maka disebut dengan Personalisasi. Kedua istilah tersebut pada dasarnya sama.

Metode internalisasi/personalisasi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam sampai

²⁴ Purwanto, M. Ngalim, Drs. MP, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004.

²⁵ Rosidin, H. Deden, Drs. M.Ag, *Akar-akar Pendidikan dalam Al-Quran dan Hadits*, Bandung : Pustaka Umat, 2003.

pada tahap being, yang pada akhirnya mampu membentuk siswa didik menjadi siswa yang berkarakter dan berperilaku baik.

Salah satu bentuk dari metode Internalisasi/ yang mampu membentuk siswa didik berkarakter dan beretika, dapat diaplikasikan dalam berbagai teknik, antara lain²⁶:

1). Peneladanan

Pendidik (guru) meneladankan kepribadian muslim dalam berbagai aspek, baik pelaksanaan ibadah Khos maupun Ibadah 'am. Peneladanan itu tidak hanya oleh pendidik, melainkan semua orang yang kontak dengan siswa didik, diantaranya semua guru, kepala sekolah, seluruh karyawan sekolah, pesuruh, penjaga sekolah / satpam, dan orang-orang yang berjualan di sector sekolah. Dan lebih penting lagi adalah peneladanan orang tua murid di rumah. Salah satu peneladanan itu bisa berbentuk ibadah khos seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain, juga ibadah umu, seperti meneladankan kebersihan, kerajinan, sifat sabar, transparansi, musyawarah, tepat waktu, kerja keras, jujur, tidak berkata jorok, senyum, mengucapkan salam, dan lain-lain²⁷.

Mengapa sangat efektif untuk Internalisasi?, karena siswa secara psikologis senang meniru, juga adanya sanksi-sanksi social, yakni seseorang akan merasa bersalah bila ia tidak meniru orang-orang di sekitarnya.

Dengan demikian, bila dikatakan pembelajaran agama, agama Islam ini gagal pada bagian keberagaman, sangat mungkin guru agama dan para pendidik lainnya kurang memperhatikan teori ini.

2). Pembiasaan

Kadang-kadang kepala sekolah atau pemegang kebijakan di sekolah merasa terlalu banyak waktu akan terbuang bila pembiasaan aktifitas keagamaan terlalu maksimal di sekolah. Ada pembiasaan sholat dzuhur berjamaah, dikatakan merepotkan, pemborosan waktu. Ada pembiasaan melaksakan sholat jum'at di sekolah, dikatakan pula merepotkan dan pemborosan waktu. Satu kelas menengok kawannya yang sakit, yang hanya membutuhkan waktu 60 menit, itu akan merugikan jam pelajaran efektif dan sebagainya.

Pandangan tersebut sebenarnya sangat keliru. Padahal inti pendidikan yang sebenarnya ialah pendidikan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dicapai dengan keberagaman yang baik, keberagaman yang baik itu bisa dicapai dengan antara lain – pembiasaan. Jarang kepala sekolah menyadari bila akhlak murid baik, maka pembelajaran lainnya akan dapat dilaksanakan dengan lebih

²⁶ Tafsir, A, Prof. Dr. , *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung : Mimbar Pustaka, 2004.

²⁷ Johansyah, "Pendidikan Karakter Dalam Islam; Kajian Dari Aspek Metodologis," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* XI, no. 1 (2011): 97.

mudah dan hasil lebih baik. Konsep ini sekalipun sangat jelas manfaatnya, pada umumnya belum jug disadari oleh kepala sekolah dan para pendidik lainnya.

3). Mensiasati kegiatan yang bersifat seremonial dengan bentuk lain.

Sebagaimana kebiasaan ketika tiba hari peringatan seperti isra' mi'raj, atau mauled nabi, suatu lembaga atau sekolah selalu membudayakan dengan kegiatan seremonial seperti ceramah agama. Itu memang bagus, tetapi karna sudah menjadi budaya di mana-mana, maka siswa kadang sudah menebak, kalau isra' mi'raj sudah pasti ceramahnya seperti itu, begitu juga ketika mauled nabi, ceramahnya sudah bisa ditebak oleh siswa. Hal itu tentunya akan membosankan bagi para siswa.

Untuk menginternalisasikan keberagaman siswa, pihak sekolah atau pendidik harus mampu mensiasati dengan kegiatan yang lain, yang sesuai dengan tema hari peringatan tersebut. Bila peringatan isra' mi'raj, karena temanya adalah menghasilkan shalat, maka ubah dengan kegiatan lain, seperti dikumpulkannya siswa di masjid atau mushalla, kemudian shalat sunah dua rakaat sepuluh kali (shalat sunah muthlak), kemudian setelah selesai masuk ke ruang kelas kembali untuk belajar efektif. Ketika peringatan maulid nabi, siswa dikumpulkan di mushalla atau aula, kemudian guru memimpin, siswa diperintahkan membaca salawat sekian kali, kemudian masuk kelas kembali belajar efektif.

4). Berbagai Do'a

Do'a akan memulai pelajaran, boleh saja sekali-kali membaca suatu ayat atau beberapa ayat al-Qur'an, do'a selesai belajar sebaiknya jangan satu macam, boleh diganti dengan bacaan semacam wirid, misalnya guru berkata, "anak-anak kita telah selesai belajar, kita akan pulang ke rumah, mari kita membaca ayat Kursi 3 kali, mulai !!!", kemudian pulang guru tidak usah mengucapkan apa-apa lagi.

Dalam membaca do'a, diharapkan variatif dan penuh kekhusyu'an, agar siswa tidak jenuh dan mampu menggetarkan hati siswa.

5). Membaca Al-Qur'an

Sekitar sepuluh menit sebelum jam pertama di mulai, dianjurkan siswa- siswi membaca al-Qur'an yang dibawanya dari rumah.

6). Selalu Thahur (suci)

Maksudnya para siswa itu selalu dalam keadaan berwudlu, wudlunya tidak pernah batal, guru dapat menganjurkan siswa-siswinya agar selalu thahur (suci), tentu saja guru meneladani terlebih dahulu.

7). Puasa Sunah

Siswa siswi sangat dianjurkan melaksanakan puasa sunah, seperti puasa senin dan kamis, seninnya saja atau kamisnya saja. Sebaiknya guru meneladani terlebih dahulu.

Pendidikan menuju keberagaman yang tinggi harus di dukung oleh semua pihak (stakeholders), termasuk orang tua di rumah, dukungan itu sebenarnya merupakan bagian dari penerapan metode Internalisasi atau personalisasi.

c. Implementasi melalui pembelajaran dan kegiatan ekstra kulikuler

Bisa saja menambah jam pelajaran agama yang diberikan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam hal ini kurikulum tambah, atau kegiatan ekstra kurikuler perlu ditambahkan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan penekanan utamanya pada pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekstra kurikuler tersebut bisa berbentuk pesantren kilat, Qiyamul lail, kajian keagamaan, sholat berjamaah, mengumpulkan dana dan bersama-sama menyantuni orang miskin dan lain-lain.

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan hendaknya di sekolah disediakan seorang guru agama semacam kyai yang secara khusus membimbing pelaksanaan amaliyah keagamaan di sekolah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkarakter dan pelaksanaan pendidikan karakter, dapat ditarik kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan bagian dari politik pemerintah, corak, arah dan tujuan pendidikan ditentukan oleh pemerintah. Dengan arah demikian maka pemerintah membuat kebijakan dan aturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. System penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam rangka tercapainya tujuan negara.
2. Banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan di Indonesia, khususnya di era reformasi saat sekarang, diantaranya UU No.4 Thn,1950 jo UU No.12 Thn,1954, UU No.2 Thn 1989, dan UU No.20 Thn 2003. Tentang sytem pendidikan nasional. Selain itu ada PP No.19 Thn 2005, Permen 22 Thn 2006, Permen 23 Thn 2006, Permen 24 Thn2006.
3. Pendidikan keimanan dan ketakwaan merupakan bagian penting dari pendidikan, karena pendidikan keimanan dan ketakwaan menjadi ruh dari kehidupan dan ruh dari tujuan pendidikan .

4. Memahami dan mendalami ajaran agama islam dengan betul-betul sampai mendalam, akan membuahakan perilaku yang terpuji (beretika) dan memiliki karakter yang terpuji.
5. Untuk membumikan ajaran islam kedalam diri pribadi siswa dalam pengajaran diperlukan beberapa strategi dan metode, seperti mengubah orientasi dan fokus pengajaran agama, menambah jam pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler, dan dengan menggunakan metode *internalisasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.M., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Ali, Hery Noer, Drs. MA dan Munzier S. Drs. MA. , *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta : Friska Agung Insani, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Buchori, Mochtar, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*, Jakarta : IKIP Muhammadiyah. 1994.
- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Fathurrohman, Pupuh, Prof. *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung : Reflika Aditama, 2007.
- Gunawan, H. Ary, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1986.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia:Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.
- Johansyah. “Pendidikan Karakter Dalam Islam; Kajian Dari Aspek Metodologis.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* XI, no. 1 (2011): 97.
- Kambali, Kambali. “PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EMOSIONAL SERTA INTELEKTUAL DI MASA PRENATAL.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2, Sept (2018): 129-48.
- Kambali, Kambali, Ilma Ayunina, and Akhmad Mujani. “TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KARATER SISWA DI ERA DIGITAL (Studi Analisis Pemikiran Pendidikan Islam Abuddin Nata).” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2, Sept (2019): 1-19.
- Kambali, M Pd I. “RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH AL-ZARNUJI DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN MODEREN.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 17-30.
- Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Mastuhu, M. Ed, *Memperdayakan Sytem Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Mulyasa, E, Dr. M.Pd, *Kurikulum Yang Disempurnakan*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nata, Abudin, Prof. Dr. MA, *Manajemen Pendidikan* , Jakarta : Fajar Inter Pratama, 2003.
- Muslich, Masnur, and Pendidikan Karakter. “Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, Cet. 2.” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2011.
- Panduan Lengkap KTSP*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2007.
- Purwanto, M. Ngalm, Drs. MP, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Rosidin, H. Deden, Drs. M.Ag, *Akar-akar Pendidikan dalam Al-Quran dan Hadits*, Bandung : Pustaka Umat, 2003.
- Rosad, Ali Miftakhu. “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH.” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 02 (2019): 173–90.
- Rosyad, Ali Miftakhu. “Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI.” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 2, no. 1 (2019): 64–86. doi:10.5281/zenodo.3553865.
- Samani, Muchlas, and Hariyanto. *Pendidikan Karakter; Konsep Dan Model*, 2016.
- Sudrajat, Ajat. “Mengapa Pendidikan Karakter?” *Jurnal Pendidikan Karakter* 1, no. 1 (2011): 47–58. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1316/1094>.
- Suharto, Toto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jogjakarta : Ar-Ruzz, 2006.
- Tafsir, A, Prof. Dr. , *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung : Mimbar Pustaka, 2004.